

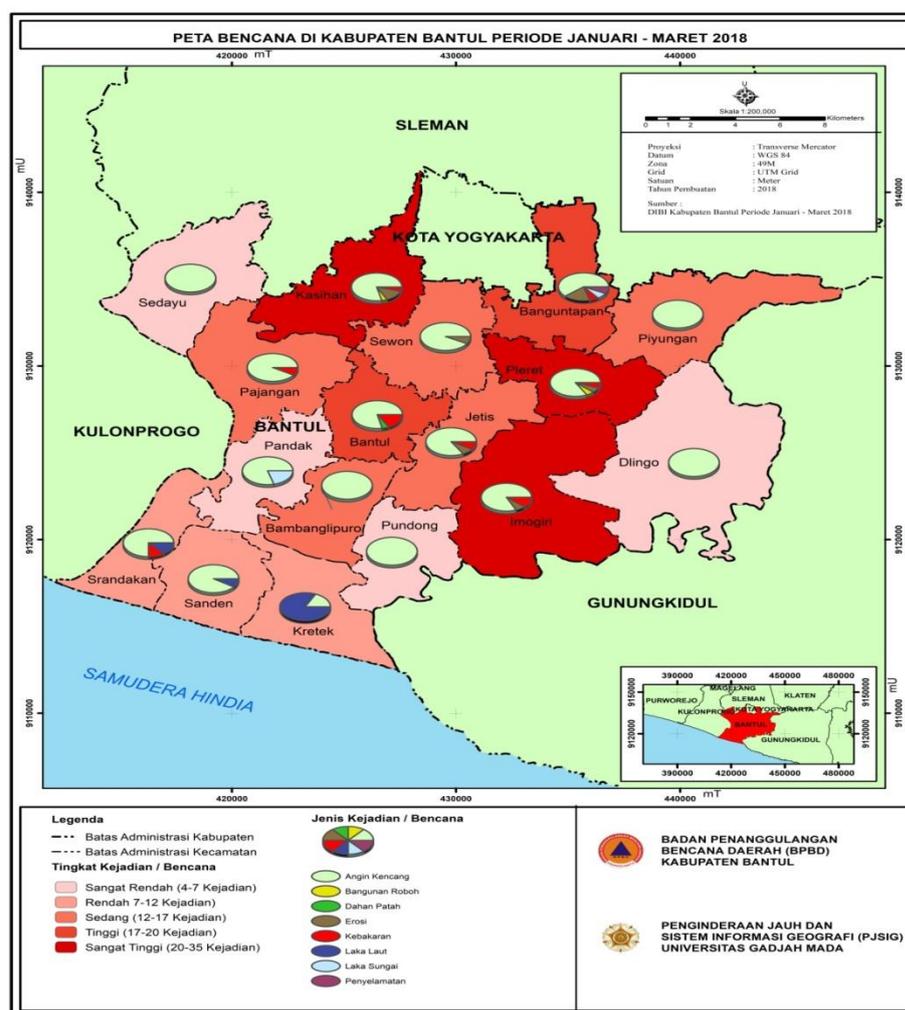
BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Umum

1. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul

a. Peta Bencana Kabupaten Bantul Periode Januari-Maret Tahun 2018



Gambar 2.1

Peta Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2018

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Dari gambar peta bencana Kabupaten Bantul di atas, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul memiliki potensi terjadinya bencana alam. Dari peta tersebut dapat dilihat bahwa bencana yang memiliki potensi cukup tinggi untuk terjadi di Bantul yaitu kebakaran, laka laut, laka sungai, dan erosi. Peta Kabupaten Bantul dominan berwarna merah dan merah tua, hal itu menunjukkan bahwa rekapitulasi kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul sangat tinggi.

Daerah-daerah yang memiliki potensi terjadinya bencana angin kencang atau angin puting beliung diantaranya yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Imogiri, Bambanglipuro, Pundak, Kasihan, Banguntapan dan sebagian daerah di Kecamatan Piyungan.

b. Lokasi Geografis di Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang secara geografis terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ $08^{\circ} 00' 27''$ pada Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ pada Bujur Timur.

Pada lokasi sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Berdasarkan bentang alamnya, Kabupaten Bantul terdiri dari area dataran rendah yang terletak pada bagian tengah, sedangkan perbukitan terletak pada bagian timur dan barat, selanjutnya kawasan pantai berada sebelah selatan.

c. Batas Wilayah

Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

d. Luas Wilayah

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sebesar 506,85 Km²(15,905 dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan topografi yaitu sebagai dataran rendah sebesar 40% dan lebih dari separuhnya 60% adalah perbukitan yang kurang subur, sehingga secara garis besar terdiri dari:

- 1) Bagian barat merupakan daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 Km² (17,73% dari seluruh wilayah).
- 2) Bagian tengah merupakan daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 Km² (41,62 %).
- 3) Bagian timur merupakan daerah yang landau, miring dan terjal yang keadaannya masih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 Km² (40,65%).
- 4) Bagian selatan merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

2. Pembagian Administratif di Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul secara administratif terdiri atas 17 kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan. Beberapa desa di Kabupaten Bantul selanjutnya dibagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*) dan Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km². Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan paling banyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan tujuh puluh dua pedukuhan.

Secara umum, jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan adalah sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan pedesaan adalah sebanyak 34 desa.

Table 2.1

Pembagian Administratif di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Luas	Desa	Pedukuhan
1	Banguntapan	28,48 Km ²	8	57
2	Jetis	24,47 Km ²	4	64
3	Pleret	22,97 Km ²	5	47
4	Bambanglipuro	22,70 Km ²	3	45
5	Sewon	27,16 Km ²	4	63
6	Imogiri	54,49 Km ²	8	72
7	Kretek	26,77 Km ²	5	52
8	Sanden	23,16 Km ²	4	62
9	Srandakan	18,32 Km ²	2	43
10	Sedayu	34,36 Km ²	4	54
11	Pandak	24,30 Km ²	3	49
12	Pajangan	33,25 Km ²	3	55
13	Kasih	33,38 Km ²	4	53
14	Piyungan	32,54 Km ²	3	60
15	Bantul	21,95 Km ²	5	50
16	Pundong	23,68 Km ²	3	49
17	Dlingo	55,87 Km ²	6	58

Sumber: Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul tahun 2014

3. Kondisi Sosial Budaya di Kabupaten Bantul

a. Kepadatan Penduduk Geografis

Kepadatan penduduk geografis di Kabupaten Bantul menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis juga menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk pada suatu daerah. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi di Bantul terletak di Kecamatan Sewon, Banguntapan dan kasihan sedangkan kepadatan penduduk di Bantul dengan geografis rendah terletak di Kecamatan Dlingo, Pajangan, dan Pleret.

Tabel 2.2

Kepadatan Penduduk Geografis Per-Kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Srandakan	18,32
2	Sanden	23,16
3	Kretek	27,77
4	Pundong	23,68
5	Bambanglipuro	22,7
6	Pandak	24,3
7	Bantul	21,95
8	Jetis	24,47
9	Imogiri	54,49
10	Dlingo	55,87
11	Pleret	22,97
12	Piyungan	32,54
13	Banguntapan	28,48
14	Sewon	27.16.00
15	Kasihan	32,38
16	Pajangan	33,25
17	Sedayu	34,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul sesuai mata pencahariannya terdiri dari penduduk yang bermatapencaharian di bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas, dan air, konstruksi, perdagangan, komunikasi/ transportasi, keuangan dan jasa lainnya.

Berikut ini adalah tabel persentase penduduk yang bekerja bekerja menurut lapangan pekerjaan utama:

Tabel 2.3

Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Bantul

NO	Lapangan Pekerjaan Utama	PERSENTASE
1	Pertanian	25,56%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,98%
3	Industri	18,95%
4	Listrik, Gas, Air	0,07%
5	Konstruksi	8,88%
6	Perdagangan	21,16%
7	Komunikasi dan Transportasi	4,56%
8	Keuangan	1,61%
9	Jasa	16,89%
10	Lainnya	0,27%
	Jumlah	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul Tahun 2013

4. Perdagangan

Pemerintah Kabupaten Bantul telah berkomitmen untuk mengedepankan aspek peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan pasar dan toko tradisional. Dalam upayanya untuk menjaga komitmen tersebut, aspek permodalan, kelembagaan dan kepemilikan lahan pasar tradisional menjadi prioritas untuk selalu ditingkatkan.

Hampir seluruh pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Bantul telah direvitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional dan toko modern di Bantul. Untuk mengantisipasi agar masyarakat Bantul tidak memiliki kecanduan untuk berbelanja di toko modern dan agar lebih merasakan kenyamanan berbelanja di pasar tradisional. Berikut ini daftar pasar yang telah direvitalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

5. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul

- a. Visi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”*. Secara filosofis, visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri,

memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

b. Misi

Adapun Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
- 2) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- 4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

- 6) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

B. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Bantul

1. Latar Belakang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Bantul

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang sangat rawan bencana yang disebabkan karena peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor. TAGANA di Bantul sebagai organisasi sosial yang beranggotakan para pemuda, pada hakekatnya sebagai organisasi telah memenuhi empat persyaratan keorganisasian, yakni adanya dua orang atau lebih, nilai yang menghimpun orang tersebut, adanya tujuan bersama serta kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembentukan organisasi TAGANA di Bantul merupakan suatu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan generasi muda dalam berbagai aspek penanggulangan bencana, khususnya yang berbasis masyarakat. Keberadaan TAGANA di Bantul menempatkan organisasi yang diterima oleh masyarakat dan keanggotaannya telah dilatih pada bidang kesejahteraan sosial khususnya, serta berkemampuan dalam melaksanakan aneka peranan di bidang penanggulangan bencana secara profesional. Sehingga sebagai suatu organisasi, TAGANA di Bantul telah mampu mengembangkan program dan kegiatannya secara berkelanjutan.

2. Pengertian TAGANA

TAGANA sebagai organisasi pelayanan sosial mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Tujuan organisasi adalah untuk memproses serta merubah manusia sebagai alat untuk mencapai hasil akhir yang bersifat sosial. Selanjutnya yang menjadi sasaran sekaligus juga sebagai masukan dan keluaran utama organisasi ini adalah manusia sehingga memiliki prioritas diantara tujuan-tujuan ini, yang diantaranya dapat saling kontradiksi, misalnya pencegahan, pemberdayaan, perlindungan, dan rehabilitasi.
- b. Organisasi yang menangani peristiwa-peristiwa yang sifatnya non-rutin, terutama karena sasaran yang dihadapinya merupakan sasaran sosial yang reaktif dengan perilaku yang kadangkala sulit diprakirakan sehingga mempersulit pengendalian dan pencapaian tujuan.

3. Penanggulangan Bencana

- a. Bencana diartikan secara beraneka ragam, baik yang sifatnya umum maupun yang diwarnai oleh kepentingan organisasi dengan karakteristik bencana sebagai berikut:
 - 1) Kerusakan pada pola-pola kehidupan normal. Kerusakan ini biasanya cukup parah, kadangkala mendadak, tidak diduga dan luas jangkauannya
 - 2) Kerugian manusia, baik yang berupa kematian, hilang, luka, kecacatan, kesengsaraan maupun akibat negative pada kesehatan
 - 3) Gangguan angguan sistem pemerintahan, komunikasi, transportasi dan berbagai pelayanan umum lainnya, terutama air minum, listrik dan telepon

- 4) Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal/ penampungan, makanan, pakaian, bantuan kesehatan dan pelayanan sosial.
- b. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses dinamis, terencana, terorganisasi, dan berlanjut untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan pengamatan dan analisis bahaya serta pencegahan, mitigasi (pelunakan atau peredaman dampak bencana), kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Secara umum, tujuan penanggulangan bencana adalah:

- 1) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
- 2) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban
- 3) Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman
- 4) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.
- 5) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut dengan meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

4. Tujuan

Tujuan pembentukan TAGANA adalah tersedianya:

- a. Organisasi, mekanisme, unit, atau satuan penanggulangan bencana di lingkungan masyarakat yang terlatih memadai, selalu siaga dan mampu mendukung semua aspek penanggulangan bencana, wahana partisipasi, pemberdayaan, dan kemitraan generasi muda di bidang penanggulangan bencana.
- b. Wahana partisipasi, pemberdayaan, dan kemitraan generasi muda di bidang penanggulangan bencana.

5. Prinsip

Beberapa prinsip pelaksanaan kegiatan TAGANA meliputi:

- a. Prinsip kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan landasan organisasi dan kegiatannya.
- b. Prinsip kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dan sasaran di dalamnya selalu menjadi dasar keberadaan organisasi dan penyediaan kegiatannya.
- c. Prinsip totalitas organisasi. Organisasi harus dipahami secara utuh, sebagai instrumen hidup yang terdiri dari aneka unsur yang saling berhubungan.
- d. Prinsip tujuan organisasi. Tujuan organisasi harus disusun, diungkapkan, dipahami dan digunakan secara jelas.
- e. Prinsip komunikasi. Jalur komunikasi terbuka sangat penting guna berfungsinya organisasi secara sempurna.

- f. Prinsip pengorganisasian. Pekerjaan orang banyak harus diatur secara terorganisasi dan harus distrukturkan sehingga tanggung jawab dan hubungan dapat dipahami secara jelas.
- g. Prinsip perencanaan. Proses perencanaan berlanjut sangat penting guna pengembangan kegiatan organisasi yang bermanfaat.
- h. Prinsip kepemimpinan. Pemimpin organisasi harus memegang tanggung jawab utama guna kepemimpinan organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan dan penyediaan kegiatan profesional.
- i. Prinsip tanggung jawab profesional. Pimpinan organisasi bertanggung jawab dalam penyediaan kegiatan profesional yang berkualitas tinggi sesuai dengan standar praktik profesional
- j. Prinsip hubungan yang bertujuan. Hubungan kerja yang bertujuan dan efektif harus diciptakan antara semua unsur internal organisasi dan pihak eksternal terkait
- k. Prinsip partisipasi. Sumbangan yang tepat dari pimpinan, staf dan sasaran selalu diupayakan dan digunakan melalui proses partisipasi dinamis dan berkesinambungan
- l. Prinsip pendelegasian. Pendelegasian tanggung jawab dan wewenang kepada tenaga profesional sangat penting.
- m. Prinsip koordinasi. Pekerjaan yang didelegasikan kepada orang banyak harus dikoordinasi secara tepat sehingga sumbangan-sumbangan spesifik

dapat digunakan untuk melaksanakan tugas pokok organisasi dan seluruh energi dapat difokuskan secara tepat pada pencapaian misi.

- n. Prinsip penggunaan sumber. Sumber berupa uang, fasilitas, dan personel harus dipelihara, dilestarikan, dan digunakan dengan hati-hati sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada organisasi
- o. Prinsip perubahan. Proses perubahan berlangsung terus-menerus, baik di dalam masyarakat maupun organisasi.
- p. Prinsip evaluasi. Evaluasi berlanjut terhadap proses dan program sangat penting guna pencapaian tujuan organisasi.

6. Fungsi TAGANA

Fungsi TAGANA terdiri dari :

- a. Fungsi Pencegahan, yaitu menghambat dan atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah atau kebutuhan yang dialami oleh korban dan lingkungan sosialnya.
- b. Fungsi Pengembangan atau Pemberdayaan, yaitu menumbuh-kembangkan kemampuan, motivasi, serta peranan korban dan lingkungan sosialnya.
- c. Fungsi Rehabilitasi, yaitu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan serta memulihkan dan meningkatkan status dan peranan sosial korban dan lingkungan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Fungsi Perlindungan, yaitu menjamin setiap warga negara agar terhindar dari aneka peristiwa bencana yang menyebabkannya. mengalami berbagai permasalahan.

- e. Fungsi Penunjang, yaitu mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan bencana sektor bidang terkait lain.

7. Peranan TAGANA

Beberapa peranan TAGANA dalam siklus penanggulangan bencana adalah:

a. Kesiapsiagaan

- 1) Penyusunan dan pemeliharaan rencana-rencana penanggulangan bencana yang valid dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.
- 2) Penyiapan tindakan-tindakan darurat, seperti evakuasi penduduk ke tempat aman, penyimpanan bahan, dsb.
- 3) Penyediaan dan penggunaan sistem-sistem peringatan bahaya
- 4) Komunikasi darurat.
- 5) Penyuluhan penyadaran masyarakat.
- 6) Program-program pendidikan dan pelatihan, termasuk latihan, geladi, simulasi, dsb
- 7) Pengumpulan dan pengkajian data dan informasi yang berkaitan dengan kejadian bencana di masa lalu, kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta kondisi kerawanan lingkungan permukiman terhadap berbagai jenis bencana guna penentuan kebutuhan pemberdayaan sasaran.

b. Pencegahan

Pelibatan diri dalam pembangunan dam untuk mencegah banjir atau waduk untuk mencegah kekeringan, pembuatan peraturan perundang-undangan/peraturan daerah tentang tata guna tanah, pembangunan infrastruktur jauh dari daerah rawan bencana, dsb.

c. Mitigasi

- 1) Membantu pelaksanaan peraturan perundangan terkait dengan penanggulangan bencana.
- 2) Ikut serta/melibatkan diri dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan (seminar, lokakarya, studi banding, dll.)
- 3) Kampanye/penyuluhan sosial
- 4) Penguatan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai mekanisme penanggulangan bencana
- 5) Pengembangan sistem-sistem peringatan bahaya bencana.
- 6) Mendorong pembangunan gedung/rumah tahan gempa, angin puting beliung, dll.

d. Peringatan Dini

Pendayagunaan informasi kritis atau sangat dibutuhkan guna penanggulangan keadaan darurat. Informasi ini merupakan petunjuk awal akan kemungkinan terjadinya keadaan darurat.

e. Tanggap Darurat

- 1) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pembinaan fungsi satuan tugas pelaksana dalam pengelolaan dan mengkoordinasikan bantuan darurat.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan pencarian, penyelamatan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial terhadap korban bencana.
- 3) Peningkatan kemampuan masyarakat dan petugas dalam mengkonsolidasi diri segera sesudah terjadi bencana melalui penyediaan sarana dan prasarana darurat agar akibat bencana tidak meluas dan berkepanjangan
- 4) Pelaksanaan rencana-rencana penanggulangan bencana yang telah disusun
- 5) Pengaktifan sistem-sistem penangkal bencana, termasuk diantaranya sistem komunikasi dan informasi bencana
- 6) Pencarian dan penyelamatan (SAR).
- 7) Penyediaan makanan, tempat penampungan, bantuan medis darurat
- 8) Tindakan-tindakan evakuasi

f. Restorasi

- 1) Pembersihan reruntuhan/kotoran agar permukiman serta sarana dan prasarana umum dapat segera digunakan atau difungsikan sebelum direhabilitasi lebih lanjut. Sarana dan prasarana umum tersebut antara lain jalan, lapangan terbang, jalan kereta api, pelabuhan, gedung sekolah, rumah sakit, Puskesmas, kantor pemerintah dan swasta, serta kawasan penting lainnya. Restorasi juga dilakukan pada pelayanan pokok seperti komunikasi, suplai air bersih dan listrik.

- 2) Penyediaan rumah / penampungan sementara sejauh dibutuhkan
- 3) Pemberian bantuan psiko-sosial untuk menyembuhkan berbagai trauma yang dialami korban serta meningkatkan motivasi untuk segera keluar dari krisis akibat bencana.
- 4) Pemberian bantuan finansial segera kepada para korban untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihannya pada kehidupan normal. Dalam berbagai upaya penanggulangan bencana di luar negeri terbukti bahwa bantuan dalam bentuk uang tunai dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian korban serta mempercepat kehidupan sosial-ekonomi daerah lokasi bencana.
- 5) Penyusunan program-program pembangunan kembali daerah bencana serta langkah-langkah pembangunan jangka panjang.

g. Rehabilitasi

- 1) Perbaikan sarana dan prasarana dasar dan dalam keadaan tertentu dilakukan pemindahan permukiman ke daerah yang lebih aman;
- 2) Pemulihan pelayanan-pelayanan utama di dalam masyarakat.
- 3) Peningkatan pelayanan sosial terhadap korban bencana melalui pemberian bantuan dan rehabilitasi permukiman serta sarana umum lainnya seperti tempat ibadah, gedung, sekolah, pasar dan air bersih;
- 4) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada para korban bencana untuk mempercepat pemulihan kehidupan dan penghidupan mereka didukung dengan pemberian sarana usaha ekonomis produktif;

- 5) Peningkatan pelibatan lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya dalam rehabilitasi bencana dan keterpaduan pelaksanaannya.
- 6) Pemugaran rumah-rumah yang masih dapat diperbaiki serta bangunan-bangunan lainnya
- 7) Penyediaan rumah/penampungan sementara.
- 8) Peletakan dasar bagi tindakan rekonstruksi, antara lain penggantian bangunan dan infrastruktur yang hancur sebagai akibat bencana.

h. Rekonstruksi

- 1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana yang lebih aman sehingga ketahanan terhadap bencana di masa datang akan lebih meningkat
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana peredam bencana di masa datang.

8. Peningkatan Kinerja dan Indikator Keberhasilan

a. Peningkatan Kinerja

TAGANA membutuhkan peningkatan kinerja agar tetap dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan kompetensi, motivasi dan peranan yang memadai. Peningkatan kinerja dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Selain itu peningkatan kinerja juga dilakukan

melalui penyediaan fasilitas dan peralatan yang memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi penanggulangan bencana.

Dari sisi organisasi, tujuan peningkatan kinerja TAGANA adalah:

- 1) Semakin meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi, jangkauan dan profesionalitas kegiatan organisasi.
- 2) Semakin besarnya peranan organisasi dalam penanggulangan bencana.
- 3) Semakin besarnya tingkat kepercayaan pemerintah dan masyarakat, termasuk masyarakat internasional, terhadap peranan organisasi dalam penanggulangan bencana.
- 4) Meningkatnya kemampuan organisasi untuk menjamin bahwa kegiatannya sesuai dengan kebutuhan sasaran, diberikan dengan tepat dan cepat serta tidak tumpang tindih dengan kegiatan organisasi lain. Dari sisi sasaran kegiatan organisasi, tujuan peningkatan kinerja TAGANA adalah:

- a) Terjaminnya kualitas dan kontinuitas kegiatan yang diterima oleh sasaran sesuai dengan kebutuhannya.
- b) Terpecahkannya hambatan aksesibilitas sasaran yang disebabkan oleh persyaratan dan peraturan.
- c) Meningkatnya responsivitas organisasi terhadap berbagai kebutuhan dan masalah yang berkembang di dalam masyarakat.

b. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan TAGANA dinilai dari indikator sebagai berikut :

- 1) Semakin banyaknya kesatuan masyarakat atau komunitas yang secara mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.
- 2) Meningkatnya jumlah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang mengalokasikan APBD untuk kegiatan penanggulangan bencana, termasuk untuk kegiatan operasional TAGANA
- 3) Adanya kemampuan TAGANA dalam memenuhi kebutuhannya akan anggaran serta personel, fasilitas, dan peralatan yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya.
- 4) Besarnya frekuensi dan keberhasilan keterlibatan TAGANA dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana, baik pada saat, sebelum, maupun sesudah bencana, di daerah kerja masing-masing maupun di luar daerah kerjanya.
- 5) Kemampuan TAGANA dalam memberikan masukan guna peningkatan kinerja SATLAK PBP dan SATKORLAK PBP serta instansi dan organisasi penanggulangan bencana lainnya.
- 6) Kemampuan TAGANA dalam mengembangkan program dan kegiatannya dalam kaitan dengan peningkatan kualitas dan jangkauan penanggulangan bencana.